

**BELUM DIKOREKSI**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RAPAT KERJA DENGAN MITRA KERJA TENTANG PENETAPAN  
ANGGARAN 2019**

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Kamis, 25 Oktober 2018
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 20.00 WIB s.d 22.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Pengesahan hasil pembahasan rincian program dan alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga/Badan mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala Bapel BPWS beserta jajaran.

## **JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):**

**.... Kementerian dan Lembaga.**

**Badan Mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN tahun anggaran 2019.**

**Yang hasilnya akan segera disampaikan kembali kepada Banggar DPR RI dan rencanya akan diserahkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 29 Oktober 2018.**

Kami harapkan hal-hal yang sudah disampaikan oleh semua Mitra Kerja Komisi V DPR RI, dalam proses rangkaian pembahasan RAPBN tahun anggaran 2019 menjadi komitmen kita bersama, kita dapat mewujudkan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**Para Menteri dan Kepala Badan dan Pimpinan serta Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.**

Berdasarkan hasil-hasil rapat pembahasan RKAKL Kementerian Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI pada RAPBN tahun anggaran 2019 beberapa waktu yang lalu, dan berdasarkan laporan tertulis dari Badan Anggaran DPR RI sebagaimana tercantum dalam surat pimpinan badan anggaran nomor AG/184/DPR RI/10/2018 tentang penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2019 tanggal 19 Oktober 2018, maka pengalokasian anggaran untuk masing-masing mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

**Mohon bisa ditayangkan dalam tabel.**

Pak Menteri dan Kepala Badan bisa mengecek alokasi anggaran Kementerian dan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN tahun anggaran 2019.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pagu RAPBN tahun 2019, hasil Rapat kerja dan RDP, 110 trilyun 331 milyar 599 juta 735 ribu rupiah, pagu RAPBN tahun anggaran 2019 hasil Banggar tetap, 110 trilyun 331 milyar 599 juta 735 ribu rupiah.

Sekretariat Jenderal dan seterusnya bisa dilihat dan sekaligus dicek satu persatu pak, saya tidak bacakan lagi karena ini tidak ada perubahan.

Kementerian Perhubungan, pagu RAPBN tahun 2019 hasil Rapat kerja dan RDP 41 trilyun 554 milyar, 917 juta 054 ribu rupiah, pagu RAPBN hasil banggar hasil ketok tidak ada perubahan, begitu juga dengan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen Pembangunan Laut Dan Udara, Keretaapian Badan Penelitian Pengembangan, Badan Pembahasan Sumber Daya Manusia, dan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, 4 triliun 325 juta 623 juta 104 ribu rupiah, pagu RAPBN tahun anggaran 2019 hasil Banggar tetap, begitu juga dengan Sekretaris Jenderal, (rekaman tidak jelas) Dirjen Pembangunan dan Permbudayaan Masyarakat Desa, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Dirjen Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Pemukiman Transmigrasi, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi tidak ada perubahan.

BMKG, pagu RAPBN tahun anggaran 2019, 1 triliun 745 milyar 228 juta 195 ribu rupiah, pagu RAPBN 2019 hasil Banggar tetap.

Badan Nasional dan Pencarian Pertolongan Basarnas, Pagu RAPBN tahun anggaran 2019 1 triliun 986 milyar 896 juta 526 ribu rupiah, pagu RAPBN 2019 hasil Banggar tetap.

Baik program dukungan manajemen, program peningkatan sarana dan prasarana, program pengolahan pencarian pertolongan dan penyelamatan.

... BPWS 289, 18 milyar 321 juta 445 ribu rupiah, pagu RAPBN tahun 2019 hasil Banggar tetap 218 milyar 3231 juta 445 ribu rupiah.

Mohon di cek kalau ada angka yang tidak sesuai dengan mitra kerja, berdasarkan tabel (rekaman tidak jelas) untuk masing-masing lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI, dalam RAPBN tahun anggaran 2019 tersebut kami mintakan dahulu tanggapan sekaligus persetujuan dari para anggota Komisi V DPR RI, jadi untuk .. saya menawarkan kepada Anggota, sebentar pak saya jelaskan dulu, nanti kita akan beri kesempatan kepada masing-masing Fraksi untuk memberikan pandangan pikirannya, kalau ada Fraksi yang menyatakan setuju, silakan nyatakan persetujuannya melalui catatan-catatan, begitu juga kalau ada yang tidak setuju kami persilakan, itu yang pertama.

Yang kedua persetujuan atau keputusan kita para Rapat kerja hari ini itu masih akan kita tindak lanjuti pada hari senin dan pada hari selasa untuk para Eselon I yang kita masih punya catatan-catatan yang masih perlu kita sinkroniasi lagi, itu kita akan undang tentu tidak semua lagi, dari catatan-catatan yang kita lakukan dalam RDP kita akan undang di hari Senin dan Selasa, jadwalnya kita akan sampaikan.

Itu laporan dari kami meja pimpinan, kalau ada usul pendapat dari Anggota nanti yang pertama dulu, kita berikan satu Fraksi mewakili satu, oke ya setuju ya.

Yang kedua kita akan lanjutkan, Rapat kerja pada hari Senin, Selasa dengan para Eselon I yang menurut catatan kita itu masih ada sinkroniasi berdasarkan catatan-catatan yang disampaikan oleh para Anggota atau para wakil Fraksi masing-masing untuk kita bahas lebih lanjut dihari senin, hari selasa, setuju ya.

Baik untuk itu...

**F-PD (Dr. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si):**

**Sebentar pimpinan.**

**Terima kasih pimpinan.**

**Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.**

**Yang saya hormati bapak-bapak pak Menteri.**

**Bapak Kepala Badan beserta seluruh jajaran yang saya hormati.**

**Yagn saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi V DPR RI.**

Pimpinan, saya melihat tambahan pimpinan tadi itu tidak ada penambahan untuk mitra Komisi V DPR RI, barangkali pada kesempatan ini sebelum minta persetujuan dari Fraksi-Fraksi, alangkah baiknya teman-teman dari Banggar menjelaskan kepada kita semua kenapa sampai tidak ada penambahan anggaran.

Ini tidak biasanya pimpinan terjadi seperti itu, untuk itu barangkali saya kembalikan kepada pimpinan, agar teman-teman di Banggar memberikan penjelasan kepada kami, kenapa sampai tidak ada (rekaman tidak jelas), demikian lebih kurangnya mohon maaf, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, dari wakil Banggar bisa menjelaskan sedikit terutama catatan-catatan yang kita minta supaya anggota Komisi V DPR RI di Banggar itu bisa memperjuangkan berkaitan dengan hasil RDP RDP kita.

Pak Rahmat silakan.

**F-PDIP (Dr. H. RAHMAT NASUTION HAMKA, SH., M. Si.):**

**Terima kasih pimpinan atas waktunya.**

Langsung saja konkrit, yang diusulkan tadi prinsipnya sepakat tetapi karena ktia ada pembahasan hari senin dan selasa, saya pikir tidak ada salahnya diberikan juga ruang kepada anggota secara terbatas untuk menyampaikan langsung secara pengambil keputusan kebijakan yang saat ini hadir itu para Menteri, sehingga nantinya kita berharap pembahasan pada hari senin dan selasa itu akan lebih efektif, mungkin ada hal-hal yang sangat urgensi yang perlu disampaikan didengar langsung bapak Menteri dan Kepala Stakeholder yang langsung pemangku kebijakan, ini nantinya bisa mengarahkan kepada Eselon I nya, begitu, saya kira ini penting juga menurut

kami agar nantinya senin, Selasa itu dapat kita juga mendapat gambaran jelas, karena kita berharap ada masalah-masalah kita hari ini Pak Menteri langsung dengar dan untuk senin Selasa itu, terima kasih pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih tadi kita sudah sepakat bahwa satu Fraksi satu orang, nanti Pak Rahmat atau teman-teman yang ingin menyampaikan tolong pesannya yang mewakili Fraksi kan itu, nanti kalau masih ada ruang baru kita bisa Pak, kita sepakat satu orang satu Fraksi, baik kalau begitu kita beri kesempatan kepada Anggota Banggar dulu, tentu saya bacakan dulu Pak, nanti Bapak bisa bacakan setelah saya siapa yang mewakili Banggar, surat dari Banggar nomor Ag18704 DPR RI 10 2018 penting.

Derajat segera, 1 lembar, penyampaian hasil pembahasan RUU RAPBN 2019, yang terhormat pimpinan Komisi I DPR RI sampai Komisi XI DPR RI, Jakarta, sesuai dengan hasil pembahasan Panja belanja Pemerintah pusat, dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2019 bersama ini kami sampaikan hasil pembahasan belanja kementerian lembaga sebagaimana terlampir sebagai bahan penyempurnaan RKAKL di Komisi V DPR RI dengan mitra kerjanya, sehubungan dengan itu kami mohon agar hasil RKAKL rincian perprogram disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagaimana penetapan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, pimpinan Badan Anggaran DR. HM. Azis Syamsuddin, SH, alokasi anggaran belanja KL APBN tahun 2019 sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi Pak, silakan dari Banggar yang mewakili.

Pak Hamka atau Pak Ridwan, silakan Pak ini baru pertama Pak, jangan-jangan Pak Hamka teman-teman tidak ada gerakan, disana.

#### **F-PG (DRS. HAMKA BACO KADY, MS):**

***Bismilahirrahmanirrahim.***

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati.**

**Seluruh Menteri mitra kerja Komisi V DPR RI dan seluruh jajarannya.**

Pertama saya ingin menjeelakan dulu bahwa jawaban pamungkasnya bahwa baru tahun ini tidak ada dana optimalisasi.

Yang kedua, tambahan anggaran sebanyak 26,5 triliun itu dialokasikan kepada dana pencadangan bencana 14,4 triliun, sedangkan 12,5 triliun itu dialokasikan kepada belanja KL diantaranya kepolisian 8,6

trilyun, sedangkan 2,5 trilyun yang lainnya tentara dan sebagainya di sektor keamanan, disitulah 9 penyebabnya sehingga tidak ada pergeseran anggaran, namun demikian terhadap anggaran untuk BMKG itu sudah dianggarkan sebagai cadangan nanti di kordinasikan oleh Menko Maritim dengan Basarnas, tetapi ini 14,4 trilyun nitigasi bencana.

Kenapa, karena agak terlambat didalam pembahasan-pembahasan, padahal sebenarnya surat menyurat dari BMKG sudah cukup banyak dan Bapenas juga sudah merespon hal itu, oleh karena itu diambil alih oleh di kordinir oleh kementerian Maritim untuk penanganan bencana.

Itu saja alasan pokoknya pak ketua dan teman-teman sekalian, yang lain-lain saya kira yang berkurang juga adalah PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak), mengalami pengurangan, tetapi pajak progresifnya cukup bagus.

Yang ingin saya sampaikan juga bahwa ada fisik anggaran yang dicadangkan adalah 296,3 trilyun atau 18,4%, jumlah pemasukan 2169 defisit 296 lebih. Kira-kira seperti itu postur anggaran yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini, kami dengan teman-teman ada pak Ridwan pak Bambang sudah memperjuangkan semaksimal mungkin, syukur-syukur tidak ada pengurangan pak ketua, terima kasih mohon maaf, *Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, saya kira itu penjelasan umum, dari teman-teman Badan Anggaran memang ya ini selama saya pimpinan ini baru pertama tidak ada (rekaman tidak jelas) optimalisasi dari Banggar, bukan selama saya pimpin, selama saya di Komisi V DPR RI.

Itu faktanya untuk itu kita langsung saja berikan pada masing-masing wakil dari Fraksi, tetapi kita juga tetap batasi, karena ini apa namanya langsung saja pada pokok persoalannya, setuju atau tidak setuju ada catatannya apa, kalau bisa 3 sampai 5 menit.

Saya persilakan Fraksi PDIP, kami persilakan pak.

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

**Terima kasih pak Ketua.**

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

**Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian.**

**Yang saya hormati pimpinan ketua dan para wakil ketua dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi V DPR RI yang tercinta.**

**Bapak Menteri Pekerjaan Umum.**

**Bapak Menteri Perhubungan.**

**Bapak Menteri Kementerian Desa.**

**Kepala BMKG.**

**Kepala Basarnas dan BPWS.**

**Beserta seluruh jajaran Pemerintahan yang pada hari ini mengikuti Rapat kerja dalam rangka penetapan persetujuan untuk melanjutkan RUU APBN 2019 ketahap tingkat II.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini akhirnya kita dapat menyelesaikan pembahasan RUU APBN 2019 dalam keadaan sehat walafiat kita sudah berada dipenghujung pembahasan yang sangat penting bagi proses pembangunan bangsa dan negara kita.

Fraksi PDIP mencermati dengan sangat baik, bahwa proses pembahasna RUU APBN ini berjalan dengan demokratis, aspiratif, akomodatif dan mendalam.

Fraksi PDIP menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah yang, demikian memberikan kesempatan dan peluang untuk kita bahas secara bersama-sama, Pemerintah juga telah benar-benar mengikuti serta memberikan dukungan yang penuh kepada anggota DPR sesuai dengan peraturan Perundang-undangan terutama tata tertib, juga mengakomodir segala kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dan telah diucapkan oleh seluruh anggota dewan dalam sumpah jabatannya, dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan setiap anggota, dengan tanpa meninggalkan atau membuka serta mengakomodir secara baik setiap hasil kunjungan kerja secara komisional atau secara spesifik.

Mengingat fungsi DPR RI sebagai lembaga yang tidak hanya membahas anggaran, fungsi anggaran, fungsi legislatif dan fungsi pengawasan, dengan akan ditetapkannya atau diselesaikannya pembahasan Undang-undang APBN 2019 ini, kami menghimbau kepada seluruh segenap unsur Pemerintah untuk lebih memberdayakan juga fungsi pengawasan yang lebih berdaya guna, efektif, mengingat terbatasnya anggaran sehingga perlu adanya penajaman dalam pelaksanaan dilapangan.

Fraksi PDIP juga berharap agar 2019 ini lebih baik tingkat penyerapannya sehingga dengan demikian kita berharap semoga dengan segera di tetapkannya Undang-undang ini untuk dilaksanakan tingkat pelaksanaan secara cepat, baik itu pelalangan yang lebih dini, sehingga pelaksanaan dapat segera dilaksanakan begitu memasuki tahun anggaran baru di 2019 yang akan datang.

Fraksi PDIP juga merasa menyatakan keprihatinan yang mendalam atas berbagai musibah dan bencana alam yang terjadi di tengah-tengah

terbatasnya anggaran ini, oleh karena itu kejadian dan pengalaman yang setiap tahun kita hampir sering kita alami, kami menghimbau agar dialokasikan anggaran dalam rangka persiapan menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita alami pada waktu yang lalu.

Sebelum kami ingin menyampaikan persetujuan terhadap RUU ini kami ingin (rekaman tidak jelas) terutama kepada BMKG dan Basarnas, Fraksi PDIP mengharapkan dan memberikan dukungan agar ditingkatkannya alokasi anggaran bagi lembaga terutama BMKG ini, mengingat fungsinya yang sedemikian penting terkait dengan informasi tentang kondisi dan nitigasi serta persoalan-persoalan yang terkait dengan bencana yang merupakan kondisi yang memang kita hadapi sebagai negara maritim, negara yang berada di ring of fire oleh karena itu kedepan seyogyanya Pemerintah lebih memberikan perhatian yang lebih kepada keberdayaan lembaga ini untuk memberikan kekuatan kalibrasi agar seluruh peralatan dapat berfungsi secara optimal dan maksimal.

Sehingga nantinya memberikan informasi yang tepat, cepat dan akurat, Fraksi PDIP berharap agar seluruh lembaga yang terkait dengan informasi ke mkg an ini untuk berkewajiban menggunakannya secara baik dan terutama khususnya Pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang sehari-hari menghadapi ancaman bahaya bencana alam tersebut.

Fraksi PDIP juga berharap agar Sumber Daya Manusia di BMKG terus ditingkatkan, profesionalismenya dan profesionalitasnya.

Demikian juga kepada Basarnas, Fraksi PDIP mengharapkan agar nantinya semakin diperkuat Sumber Daya Manusia, serta dibangunnya beberapa kantor SAR yang terutama di beberapa daerah yang secara nitigasi memiliki ancaman yang besar terhadap keselamatan jiwa masyarakat serta perlunya ditingkatkan sarana dan prasarana.

Untuk kementerian Perhubungan Fraksi PDIP berharap agar tidak terjadi lagi ketimpangan alokasi anggaran diseluruh sektor Direktorat Jenderal, baik itu darat, laut dan udara secara seimbang, mengingat persoalan-persoalan yang dihadapi atau semakin rumitnya dalam rangka upaya kita untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

Kepada Direktorat Jenderal Kereta Api kami mendukung perlunya revitalisasi track perkeretaapian kita yang memang semakin hari semakin diperlukan dalam rangka mengangkut distribusi logistik maupun juga penumpang, demikian, juga perlunya diselesaikan double track, maupun double double track.

Fraksi PDIP juga mengharapkan agar kinerja tol laut itu segera dapat direalisasikan dan dapat dikembangkan dengan baik, untuk Kementerian PU, Fraksi PDIP dapat memahami kebijakan Pemerintah yang memprioritaskan ketersediaan air baku dalam rangka mendukung ketahanan pangan dengan melakukan pembangunan bendungan dan embung serta perbaikan irigasi



baik itu bahkan sampai ketinggian tertier atau yang disebut dengan Irdes, Irigasi desa.

Fraksi PDIP menyambut sangat baik, dengan keberadaan upaya Pemerintah untuk memberikan jembatan gantung untuk melakukan komunikasi didaerah-daerah yang terpencil terutama terisolasi (rekaman tidak jelas) langsung dengan kebutuhan rakyat kecil, demikian juga mendukung keberadaan rumah susun, yang sangat bermanfaat dan diperlukan oleh masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah, demikian juga kegiatan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau yang disebut isu serta argopolitan yang sangat membantu para petani dan jalan usaha tani.

Yang terakhir kepada kementerian desa Fraksi PDIP merasakan kebersamaan yang semakin baik, kita semakin berjalan beriringan didalam upaya kita untuk mempercepat meningkatkan desa yang tertinggal menjadi desa yang tidak tertinggal.

Dengan catatan marilah kita bersama-sama mencermati secara khusus poenggunaan dana desa agar lebih efektif dan tepat guna serta dapat melaporkan atau kepala-kepala desa melaporkan, mempertanggungjawabkan secara baik dan terbuka, atas dasar proses pembahasn yang demikian ini maka Fraksi PDIP dapat menyetujui RUU APBN 2019 untuk diteruskan ketinggian Paripurna untuk ditetapkan menjadi Undang-undang APBN di 2019.

Kami atas nama PDIP menyampaikan terimakasih penghargaan kepada Pemerintah dan seluruh jajarannya, serta seluruh anggota Komisi V DPR RI yang telah bekerja sebaik-baiknya sehingga menghasilkan rancangan Undang-undang yang demikian baik ini.

Demikian pimpinan, terima kasih atas semuanya, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Yosef sebagai yang mewakili dari Fraksi PDIP dan menyatakan persetujuannya untuk dibahas di Paripurna, untuk pengambilan Keputusan Tingkat II.

Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar dalam hal ini diwakili oleh pak Anton, silakan pak.

#### **F-PG (Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING):**

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.**

**Menteri PUPR.**

**Menteri Perhubungan.**

**Menteri Desa Tertinggal dan juga dari Basarnas dan BMKG.**

**Dan juga dari BPWS.**

Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami dari Fraksi Golkar, kebenaran berulang tahun yang ke 54 dan tadi ditutup pertandingan olah raga yang menang Pamda menjadi juara, menyemangati dengan serius apa yang telah kita lakukan selama ini untuk memutuskan menghasilkan RUU APBN tahun 2019 yang akan ditingkatkan atau dibahas, kalau tidak salah di Paripurna tanggal 30 atau hari Rabu tanggal 31, saudara-saudara dari Kementerian sesuai dengan fungsi kami dengan kondisi anggaran yang sedemikian rupa, kami percaya kementerian maupun lembaga akan mengelola anggaran tersebut seprofesional mungkin dengan orang-orang yang profesional.

Karena di beberapa kementerian sekali dua bulan ganti eselon II, ganti Eselon III, bagaimana mereka akan mencerna atau melaksanakan penganggaran atau pekerjaan di tiap kementerian dengan baik, dari seluruh kementerian yang saya hormati, terutama di kementerian perhubungan, untuk waktu-waktu yang akan datang, agar anggaran di perhubungan darat ditambah, itu kesepakatan kita waktu rapat akan kita putuskan dan masuk agenda, karena melihat kebutuhan di perhubungan darat sangat mendasar, Bapak Ibu sekalian kementerian yang saya hormati, satu lagi yang saya harapkan tahun ini tahun politik, kementerian dan lembaga yang ada keterkaitannya dengan aspirasi anggota agar diprioritaskan tahun ini, diutamakan wilayah yang ada anggota DPR nya itulah fungsi kami sebagai 3 pengawas, dan juga legislasi, kami mengharap sekali lagi saudar-saudara akan mengelola anggaran ini seprofesional mungkin dan kami juga akan ikut mengawasi, disamping itu kita tidak usah ngotot penambahan anggaran.

Anggaran DPR saja BURT 2,3 triliun dipotong sudah 3 kali saya rapat dengan Menkeu, tetapi dengan kondisi keuangan yang sedemikian rupa, kami dari Fraksi Golkar menyadari, tadi ada kami dengar, kami ketahui bahwa anggaran atau cadangan untuk bencana alam ada 14, 4 triliun kam dari Fraksi GOLkar mengharap agar di fokuskan untuk pembangunan Palu atau Sulawesi Tengah, pura-pura biar langsung di jawab.

Jadi kami dari Fraksi Golkar, mengapresiasi Pemerintah dengan dicadangkannya anggaran ini, kepada Basarnas sama saja, kita lihat dulu di kemudian hari, bukan loby kalian dengan ketua DPR untuk menambah anggaran sudah berjalan tetapi inilah realita keputusannya.

Kenapa defisit anggaran kita sekian persen, penerimaan negara bukan pajak menurun, tetapi kita yakin dan percaya Komisi V DPR RI dengan mitranya Komisi V DPR RI secara keseluruhan bekerja sama dengan baik,

sekali lagi saya minta Bapak Ibu lihat anggota DPR tidak melanggar hukum tidak mencuri, tetapi aspirasi anggota dikedepankan sekali ini, dan tolong pejabat-pejabat di daerah itu membantu anggota DPR jangan seolah-olah bertindak itu tidak ada urusan DPR, ini saya katakan langsung, terutama kepada pihak-pihak tertentu, saya kasih tahu sekali lagi, hanya itu yang bisa saya sampaikan, jadi dari kami Fraksi Golkar, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, selama membahas anggaran RAPBN 2019 ini ada penyampaian ucapan yang salah mohon jangan disimpan dalam hati, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus.

*Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Anton yang mewakili dari Fraksi Golkar dengan menyatakan persetujuannya, selanjutnya saya persilakan Partai Gerindra.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):**

Terima kasih bapak pimpinan.

**Bapak Ibu anggota Komisi V DPR RI dan pak Menteri beserta seluruh lembaga non kementerian beserta jajarannya.**

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera.**

**Selamat malam.**

**Om swastiastu.**

**Namabudaya.**

Kami pak dari Fraksi Gerindra, sudah berusaha secara maksimal untuk ... apa yang menjadi kebutuhan daripada kementerian maupun lembaga non Kementerian.

Tetapi rupanya memang ada suatu bisa dimengerti oleh pemegang kebijakan dalam perubahan daripada anggaran itu, hanya saja, saat ini sampai dengan berakhirnya atau mendekati daripada rapat untuk Badan Anggaran yang terakhir kalinya ini tidak di (rekaman tidak jelas) dengan baik, mungkin untuk dua kementerian terutama dari Kementerian PU sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Fraksi Golkar, yang berhubungan dengan aspirasi daripada anggota, karena sesuai dengan Undang-undang MD3 Undang-undang nomor 17 tahun 2014 itu dikatakan kami harus mewakili daripada masing-masing daerah untuk bisa menyerap aspirasinya dan direalisasikan di Badan Anggaran ini.

Untuk realisasi anggarannya apabila terdapat program yang penting untuk daerah masing-masing, yang kedua itu yang berhubungan dengan kementerian Perhubungan, kemarin juga sudah kami usulkan berkali-kali yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dimana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini harus bisa menjamin keselamatan dari pada transportasi darat baik itu logistik maupun publik masal yang dimana hampir 90% ..publik maupun logistik kita, itu diangkut oleh angkutan darat, jadi dari darat menuju ke laut, laut balik lagi ke darat, dipasarkan melalui darat dan sebagainya. Udara juga begitu, kereta api juga begitu.

Kalau sudah berkali-kali menyampaikan baik itu ada yang ada di Panja maupun mohon maaf, rapat Kementerian Rapat kerja, bahwa kami mengusulkan untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bisa lebih diperhatikan karena hampir sebagian besar, atau lebih dari 90%, korban kecelakaan yang terbesar adalah dari angkutan darat.

Jadi dari sini kami mohon, kedepan kami mohon untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat harus diberikan anggaran yang lebih besar, daripada Direktorat Lainnya pak, jadi ini tentu masih banyak tugas-tugas daripada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang belum dilaksanakan dengan baik karena kekurangan anggaran.

Sebagai contoh jembatan timbang yang sekitar sebagian besar separuh lebih yang sudah diakuisisi oleh Pemerintah pusat, hingga saat ini masih belum dioperasikan.

Ini yang menjadi satu perhatian daripada kementerian maupun pemegang kebijakan daripada anggaran itu sendiri, yang berikutnya permasalahan yang berhubungan dengan BMKG maupun Basarnas, kedua lembaga ini, sangat berhubungan dengan keselamatan nyawa publik, kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada Pemerintah baik itu dibadan anggaran maupun di Komisi V DPR RI.

Keselamatan nyawa publik tidak bisa ditawar-tawar, harganya nyawa publik, sangat mahal tidak terhingga, tidak ada orang mau mati dengan diberikan anggaran, sama dengan anggaran ABPN.

Jadi ini bukti bahwa nyawa publik harus kita lindungi, dan itu juga sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 dipembukaan, seluruh tumpah darah rakyat Indonesia, harus dilindungi oleh negara ini yang terus terang kami sangat kecewa dan terus terang kami dari Fraksi Gerindra ... anggaran dari dua lembaga non kementerian Basarnas maupun BMKG, karena ini tidak sesuai dengan prikemanusiaan, dan tolong diingat ibu dari BMKG itu tidak hanya sebagai penyelamat dari nyawa publik, karena menurut informasikan ini, tetapi itu juga penginformasi kementerian hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi publik, jadi disini cuaca ini juga penting sekali ini yang harus diinformasikan oleh BMKG tujuannya adalah fungsinya adalah untuk yang pertama adalah untuk pertanian kita, karena Indonesia ini hasil terbesar seharusnya adalah pertanian, perkebunan dan perikanan yang semuanya sangat menggantungkan terhadap BMKG.

Izin, jadi ini yang penting fungsi daripada transportasi tadi harus memberikan ....

#### **KASET 2 REKAMAN TIDAK TERDENGAR**

##### **F-PDIP (ALEX INDRA LUKMAN):**

Seperti yang sudah kita dengar, untuk itu pasti pengambilan keputusan tahap pertama-teman-teman dari Fraksi Partai Gerindra juga akan menyampaikan padangan sama seperti ini, jadi belum final juga di Banggar itu.

##### **KETUA RAPAT:**

Silakan.

##### **F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Pertama tadi kan, jadi kalau menurut hemat saya yang kita setuju adalah pagu anggaran kementerian, kementerian sekian ratus milyar, titik, karena kan masih ada pembahasan, kementerian ini sekian, jadi tidak rigid begitu, kita masih bicara pagu, karena masih ada acara berikutnya sebagaimana catatan saya tadi Dirjen laut, diperhubungan, juga demikian juga di PUPR, pagunya dulu, artinya belum langsung rigid anggaran (rekaman tidak jelas), lalu ada point 3 dengan berbagai catatan tadi, tadi ada catatan, catatan Fraksi-Fraksi lain saya kira itu masuk, demikian pimpinan.

Kalau begini berarti tidak ada lagi, catatan begini tidak ada lagi pembahasan didalam untuk Eselon I nya, jadi yang kita setuju adalah pagu anggaran kementerian sesuai dengan yang dari Banggar, terima kasih.

##### **KETUA RAPAT:**

Baik pak terima kasih.

Jadi saya kira di Surat Badan Anggaran juga itu sudah jelas, untuk meminta kepada komisi, untuk membahas berkaitan dengan hasil banggar ini dan menyerahkan kepada kita itu sudah perprogram pak, untuk itu maka saya setuju didalam point ketiga, kan itu masih ada yang belum tuntas, Selasa itu kita masih harus lakukan sinkronisasi, sinkronisasi itu pak, tetapi besarnya sudah kita masukan ke Banggar pak, masing-masing Direktorat, Eselon I dan sebagainya, itu pemahaman kita, saya serahkan pak.

##### **F-PG (Drs. H. IBNU MUNZIR):**

Pertanyaan saya, katakanlah apabila Dirjen Angkatan Laut sebagaimana hasil kita Kunker kemarin yang kita minta secara tertulis yang samapi hari ini juga tidak pernah diberikan atas rincian output dan outcome terhadap subsidi 2 trilyun 2 Dirjen Laut.

Apa artinya kita berkomentar sekian lama, tidak ada artinya kenapa sampai waktu itu kan dijawab secara tertulis dari hasil output maupun outcomenya. Atas anggaran subsidi tersebut, dan juga kita temukan juga bapak di Makasar, adanya ... subsidi, oleh karena itu untuk pertemuan berikutnya tadi pimpinan komisi mengatakan kita akan bertemu lagi dengan Eselon I, begitu loh.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih pak Jhoni Allen, kita inikan sudah membahas di RDP berkaitan dengan usulan masing-masing Eselon I, memang dalam kesimpulan kita itu masih dalam tahap memahami, untuk itu maka ini juga apa namanya di Banggar ini, waktunya amat sangat mepet, mestinya kita bahas pemahaman kita dulu yang kemarin itu, baru kita rapat di (rekaman tidak jelas) untuk itu kita berikan persetujuan berkaitan dengan pagu indikatif ini, dan kemudian nanti persetujuan yang menyangkut dengan para Eselon I itu nanti di senin selasa itu pak, tetapi besarnya sudah seperti ini.

**F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Baik pimpinan kalau begitu kontennya tidak ada lagi pertemuan pentingnya contoh katakanlah misalnya Dirjen Laut, untuk katakanlah subsidinya tidak bisa di pertanggungjawaban output-outputnya terhadap 2 triliun mau dikemanakan itu anggaran kalau tetap di Dirjen Laut, atau membuat program baru di Dirjen lautnya itu sendiri, sementara ada Dirjen Laut diantara mereka yang masih sangat membutuhkan, dan itu masih satu kementerian, jadi dengan antar kementerian itu bisa itulah fungsinya untuk pembahasan, memang ... bukan kita yang terlambat, karena jawaban itu sejak lama kita sudah minta dari Kementerian dan dari Dirjennya tidak pernah dikasih.

Itu menjadi point didalam pembicaraan dengan RDP dalam setiap pembahasan Eselon I, tetapi tidak pernah dijawab secara tertulis, sama waktu kita juga kemarin ke Makasar, hanya sosialisasi, padahal kita membahas angka-angka. Coba didalam fungsi daripada kegiatan anggaran (rekaman tidak jelas) ayat 3 harus berdasarkan program fungsi dan jenis kegiatan dan jenis belanja, itu dalam APBN Undang-undang nomor 17 tahun 2003, ayat 3 pasal 15 ayat 3, terhadap penetapan APBN Undang-undang 17 tahun 2013.

**KETUA RAPAT:**

Silakan pak Ibnu.

.....:

Saya kira mungkin pada kesimpulan point kedua ini bisa kita spread 1-2 hal, jadi seluruh Fraksi di Komisi V DPR RI menyatakan mana tadi, persetujuannya, alokasi anggaran semua KL mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN tahun 2019 dengan catatan, catatan point pertama, bahwa

khusus untuk anggaran BMKG dan Badan Usaha Pencarian Pertolongan Basarnas, oleh Fraksi Gerindra, sebelumnya (rekaman tidak jelas) , kemudian catatan kedua, perlunya dilakukan sinkronisasi terhadap beberapa, ini yang dimaksud dari beliau, dilakukan sinkronisasi, jadi sinkronisasi saja dari dalam, tetapi pagu anggaran besar dan sebagainya itu sudah disetujui.

Jadi buat kesimpulan ini, (rekaman tidak jelas) tetap ada catatan, catatannya A dan B.

**F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Pimpinan, usul konkrit saya, saya bisa memahami apa yang disampaikan pak Jhoni Allen, bahwa secara kementerian is oke, tetapi didalam kementerian antar pergeseran antar Dirjen, masih ada ruang untuk kita, jadi ini menurut kami nantinya bisa menjadi, supaya kita di .... Nanti, misalnya di perhubungan kita anggap mungkin ini kurang bisa di (rekaman tidak jelas) kita bisa geser ke Dirjen lain, tetapi secara Kementerian tetap sama, itunya, pagu anggarannya, saya pikir ini saja, kalau dikunci begini, ya tidak ada ininya juga.

Jadi ini pimpinan, mungkin sekedar usul konkrit, kementeriannya tidak ada masalah besarnya, tetapi secara Eselon I kita masih bisa untuk saling apa namanya memberikan ruang, yang mana kita anggap prioritas, itu pimpinan, terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik pak sudah pak.

**F-P NASDEM (SAHAT SILABAN):**

Pak disini surat panitia anggaran, terlampir dalam rangka penyempurnaan RKAKL di Komisi V DPR RI dan mitra kerjanya, disitulah nanti fungsinya untuk Eselon I, inipun belum cukup pak, bahwa dia berkesimpulan anggaran perubahan Kementerian maupun lembaga tidak lagi berubah dari apa yang disampaikan oleh Panitia Anggaran, sempurnakanlah di Komisi V DPR RI dalam konteks RKAKL nya, itulah yang benar sehingga kesimpulannya adalah kesimpulan sebagaimana dari Panitia Anggaran yang kita terima.

Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak, jadi kita sudah apa, berunding di pimpinan, ya kita berikan persetujuan, berkaitan dengan alokasi anggaran belanja kementerian RAPBN 2019 yang dikirimkan oleh Banggar, ini saja.

Sampai disitu, ini yang kita minta persetujuan ya, setuju ya, itu berarti berkaitan dengan dengan program dan sebagainya ya.

Jadi besarnya sebagaimana alokasi anggaran belanja kementerian Lembaga (rekaman tidak jelas) berdasarkan Banggar ini kita berikan persetujuan dan kemudian ini kita sampaikan, itu dihapus, ditambahkan, (rekaman tidak jelas).

Bahasanya perlu disinkronisasikan, coba tangkap oleh TA (rekaman tidak jelas).

Saya baca ya, Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa dan PDT, BMKG, Basarnas dan BPWS menyetujui alokasi anggaran dan program kementerian lembaga, mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN tahun anggaran 2019 sebagai berikut, bahwa kebawah terus, apa itu terdapat pendanaan melalui skema kerjasama begitu, seluruh Fraksi di Komisi V DPR RI menyatakan persetujuan terhadap alokasi semua Kementerian Lembaga mitra, sesuai dengan besaran yang telah disampaikan oleh Badan Anggaran, tadi sudah betul itu, jangan dihapus lagi.

Dengan catatan:

A. Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan secara khusus ketidaksetujuannya terhadap anggaran BMKG dan badan nasional pencarian dan pertolongan Basarnas.

B. Diperlukan (rekaman tidak jelas) lebih lanjut terhadap catatan-catatan dari pandangan atau apa Fraksi, dari masing-masing Fraksi Komisi V DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap RAPBN tahun anggaran 2019.

#### **F-P NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):**

Bukan pak, diperlukan sinkronisasi lebih lanjut terhadap pandangan masing-masing Fraksi dan (rekaman tidak jelas) didalam penyempurnaan RKAKL sebagaimana permintaan panitia anggaran, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan RKAKL, itu bunyinya.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke pak, (rekaman tidak jelas) dalam rangka penyempurnaan RKAKL, setuju ya.

.....:

Saya untuk sinkronisasi saja kalau kita mau ini, inikan teman Fraksi kitakan dia tidak setujunya meminta tambah sebetulnya, dan kita juga sejujurnya kan meminta tambah kepada BMKG, pimpinan, dalam pasal 15 itu dimungkinkan dari komisi ini kepada Panitia Anggaran, karena Panitia Anggaran bukanlah keputusan terakhir, sesuai dengan susunan dan kedudukan DPR, susunan dan kedudukan DPR itu ada Panitia Anggaran, ada komisi, ada badan, apabila komisi meminta kepada panitia anggaran meminta untuk biaya operasional BMKG itu mereka sampaikan kepada eksekutif dan itu diatur dalam Undang-undang APBN penetapan, pasal 15 ayat 3, Deewan



Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan dan mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran kepada Pemerintah dalam rangka menyusun rancangan Undang-undang APBN, siapa DPR kedudukannya, Komisi Panitia Anggaran, itu dalam pasal 15 ayat 3.

Pasal 6 apabila (rekaman tidak jelas) tidak menyetujui rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBN tahun anggaran sebelumnya, siapa anggota DPR ya Komisi, Badan, Panitia Anggaran adalah menjadi perwakilan kita disana, kita bicara kepada pemegang pengelola keuangan, karena mengelola keuangan itu adalah yang ditugaskan Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga sebagai pelaksana tugas-tugas teknis yang lain, demikian pimpinan, jadi kita bisa mengatakan, menambah anggaran BMKG sekian, yang kita sampaikan kepada Panitia Anggaran dengan catatan-catatan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Diharapkan nanti masing-masing Fraksi dan juga hampir semua, sebenarnya hampir menyatakan bahwa ada catatan untuk supaya BMKG dan Basarnas ini diupayakan ada penambahan, kan itu pak, kita harapkan catatan-catatan itulah yang nanti disampaikan pandangan Fraksi, yang betul-betul menyatakan penolakan, berdasarkan pandangan Fraksi pak, itu adalah Partai Gerindra, itu saja, nanti teman-teman sampaikan lagi di Basarnas ini kondisinya ditolak oleh Gerindra, tetapi catatan-catatan dari seluruh Fraksi tetap meminta ada tambahan untuk anggaran BMKG dan Basarnas, saya kira itu pak.

.....:

Sedikit pak, jangan ada kata penolakan pak, menambah, penolakan dengan menambah 2 versi yang berbeda.

(rekaman tidak jelas).

.....:

Jadi begini kemarin itu waktu kita RDP dengan BMKG bahwa kita seakan-akan mengatakan ke beliau supaya mundur kan begitu, beliau bilang harusnya 2017 mau mundur karena anggaran tidak tersedia untuk mengantisipasi kejadian di Sulawesi Tengah kemarin, artinya kalau saya pikir penolakan yang dari Gerindra untuk hal ini, untuk penambahan anggaran secara khusus, untuk BMKG supaya hal-hal, kekeliruan atau kelalaian, kita anggap kemarin itu jangan terjadi lagi kedepan, kira-kira itu maksudnya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Nanti pembasan Eselon, pembahasan di tingkat I lagi ada di Banggar, kan itu masing-masing Fraksi silakan menyampaikan pandangannya, tentu pasti tujuan daripada Gerindra supaya ada penambahan, sekarang kita tolak saja dulu.

.....:

Pimpinan, saya kira bukan penambahan, kalau penambahan kan sudah final kita, tetapi ada 4,4 trilyun itu yang harus (rekaman tidak jelas).

#### **KETUA RAPAT:**

Iya, tetapi kita sampaikan pandangan Fraksi seperti ini, silakan nanti disampaikan kesimpulan ini mau diapakan dan sebagainya silakan dipakai anggaranya.

Setuju ya, kita pakai kita setuju, pak Menteri bagaimana, setuju bapak ibu, baik terima kasih, kalau demikian kami persilakan kepada pak... yang mewakilli pak Menteri untuk menyampaikan pandangan, closing statement silakan pak.

#### **MENTERI PDTTS:**

***Bismilahirrahmanirahim.***

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

***Omswastiastu namabudaya.***

**Yang saya hormati saudara Ketua, pimpinan, para anggota Komisi V DPR RI.**

**Para Menteri dan para Kepala Badan dan Lembaga.**

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang baik, selama ini selama beberapa tahap akhirnya kita sampai pada persetujuan dalam menetapkan RUU APBN tahun 2019.

Pemerintah komit untuk melaksanakan apa yang sudah kita sepakati mungkin ada tambahan lagi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya semoga bisa bermanfaat buat kemaslahatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, demikian *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Menteri Pekerjaan Umum, Perhubungan, BPWS, Basarnas, kita akan lanjut hari senin pak, jadi menurut catatan dari tadi kalau yang akan kita undang hari senin itu mulai dari Kementerian PUPR, itu Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penyediaan Perumahan, itu yang akan kita lakukan, mulai jam 2 pak sampai malam, terus kemudian hari selasa itu kita akan lihat Paripurna pak.

Kalau hari Selasa Paripurna, kita akan mulai pagi kalau tidak kita akan mulai jam dua dimulai dari Perhubungan, Perhubungan itu juga yang akan diundang itu adalah Perhubungan Laut Udara Darat, Kereta Api dan satu permintaan khusus dari BPTJ.

Itu kita akan undang untuk RDP sementara dari kementerian desa itu kita undang seluruhnya pak Eselon I, dibawah pimpinan pak Sekjen, itu akan kita lakukan hari Senin dan Selasa, saya kira kalau tidak ada hal-hal lain lagi, ini sementara ini kita tandatangani kesimpulanya pak saja, belum kita tandatangani, 5 pimpinan, ini saya sebagai pemimpin rapat tanda tangani persetujuan ke Banggar, yang kita simpulkan sekarang ini detail program dan sebagainya nanti kita akan menunggu setelah hari senin selasa, baru kemudian 5 pimpinan ini akan menandatangani ini kesimpulan ini, setelah Paripurna, disetujui baru dibawa kekita untuk menandatangani.

Saya kira itu saja, sekali lagi kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI menyampaikan terima kasih dan juga permohonan maaf apabila hal yang kurang berkenan, dengan ucapan *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*.

Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, *shaloom*.

**RAPAT DITUTUP PADA PUKUL .... WIB**